

**MUHAMMADIYAH DAN KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN
(Respons Muhammadiyah atas Tampilnya
Presiden Megawati Soekarnoputri)**

**MUHAMMADIYAH AND FEMALE POLITICAL LEADERSHIP:
Muhammadiyah's Response to
the Presidency of Megawati Soekarnoputri**

Suwarno

Program Studi Pendidikan Sejarah,
FKIP Universitas Muhammadiyah Purwokerto,
Jl Raya Dukuh Waluh, PO BOX 202,
Telp. (0281) 636751, 634429 Fax. (0281) 637239.

ABSTRACT

This research aims at describing the response of Muhammadiyah to female political leadership, especially to the presidency of Megawati Soekarnoputri as the fifth president of Republic of Indonesia. In so doing, this research employs historical method, heuristic, critics or selection of sources, interpretation, and historiography. The results of the research are as follows: (1) whether in terms of organization or its individual members, Muhammadiyah never opposes female political leadership; (2) in its response to the presidency of Megawati Soekarnoputri, Muhammadiyah concerns more in the required qualities of a presidential candidate rather than the gender controversy.

Kata kunci: *Muhammadiyah dan kepemimpinan politik perempuan*

PENDAHULUAN

Sejak didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang berorientasi dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Di samping itu, Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta gerakan *tajdid*. Ketiganya merupakan jati diri dan sekaligus ciri perjuangan

Muhammadiyah yang terus dipertahankan hingga sekarang (Pasha dan Darban, 2000: 113).

Mengacu pada tiga ciri perjuangan Muhammadiyah tersebut, kajian ini lebih terfokus pada ciri Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*. *Tajdid* memiliki makna yang sebangun dengan kata reformasi, pembaruan, inovasi, restorasi, dan modernisasi. Sebagai gerakan *tajdid*, Muhammadiyah telah melakukan upaya yang serius untuk memperbaiki pemahaman kaum Muslim mengenai agamanya, mencerahkan hati dan pikiran umat dengan cara mengenalkan kembali ajaran Islam sejati yang bersumber pada Al Quran dan As Sunnah (Maarif, 1987: 73). Namun demikian, kajian ini juga tidak menafikan dua ciri perjuangan Muhammadiyah lainnya (Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*).

Salah satu bentuk perhatian (*concern*) Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* adalah keinginan untuk memajukan kaum perempuan sejak organisasi ini didirikan. Keinginan untuk memajukan kaum perempuan di kalangan umat Islam diwujudkan oleh Muhammadiyah dengan pendirian organisasi Aisyiyah sebagai komponen atau sayap perempuan persyarikatan Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah (NA) sebagai wadah pembinaan remaja putri Islam.

Berpijak pada latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji relasi Muhammadiyah dan kepemimpinan politik perempuan, terutama dengan momentum naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pada bulan Juli 2001 menggantikan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati adalah perempuan pertama yang berhasil tampil sebagai Presiden RI. Kepemimpinan politiknya dianggap bersifat kontroversial bagi kaum muslimin Indonesia.

Kajian ini penting untuk dilakukan mengingat Muhammadiyah memiliki tradisi untuk tampil sebagai pionir dalam berbagai perubahan yang terjadi pada bangsa ini, bukan hanya dalam persoalan keagamaan saja melainkan juga merambah pada persoalan sosial-politik. Sebagai contoh keterlibatan Muhammadiyah dalam gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim Orde Baru yang otoritarian pada bulan Mei 1998, terutama melalui peran yang dimainkan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada waktu itu, Dr. H. M. Amien Rais. Tokoh ini oleh para mahasiswa yang menjadi tulang punggung gerakan reformasi diberi gelar sebagai "Bapak Reformasi".

Demikian pula, dukungan Muhammadiyah kepada Amien Rais untuk maju menjadi Calon Presiden (Capres) RI berpasangan dengan Siswono Yudohusodo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 5 Juli 2004, kendatipun gagal maju pada putaran II bulan September 2004. Dukungan itu dapat dipandang sebagai bagian dari komitmen dan kontribusi Muhammadiyah bagi kelangsungan gerakan reformasi. Dukungan itu sebagai upaya Muhammadiyah untuk ikut membantu mengatasi krisis multidimensi yang tengah melanda bangsa Indonesia ini.

Kajian ini bertujuan untuk mengungkap tiga masalah berikut:

1. konsepsi Islam tentang kepemimpinan politik perempuan,
2. kasus naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, dan
3. respon Muhammadiyah atas tampilnya Presiden Megawati Soekarnoputri.

Respon Muhammadiyah ini direpresentasikan melalui tokoh-tokohnya, karena tokoh ini sebagai simbol representasi Muhammadiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan ditempuh dengan menggunakan metode sejarah. Mengikuti pendapat Gottschalk (1985: 32), metode sejarah adalah proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu yang identik dengan sumber sejarah. Dalam menempuh metode sejarah, penulis mengikuti empat langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu: (1) heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berisi data-data, (2) kritik atau seleksi atas sumber-sumber sejarah, (3) interpretasi atau penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah sebagai hasil dari langkah kritik, dan (4) historiografi atau penulisan karya sejarah (Widja, 1988: 19-25; Kuntowijoyo, 1995: 89-105).

Langkah heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah dalam penelitian ini dilakukan dengan melacak sumber-sumber tertulis (bahan-bahan dokumenter). Pelacakan terhadap sumber-sumber tertulis difokuskan pada bahan-bahan dokumenter yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, baik di Yogyakarta maupun di Jakarta. Bahan-bahan dokumenter itu, misalnya: Surat Keputusan Muktamar, Surat Keputusan Sidang Tanwir, dan arsip-arsip yang lain. Selain itu, dilacak majalah Suara Muhammadiyah sebagai organ resmi persyarikatan Muhammadiyah. Guna memudahkan dalam melacak sumber-sumber tertulis, penulis terlebih dahulu menyiapkan blangko dokumentasi untuk mengumpulkan bahan-bahan dokumenter dan kartu catatan bibliografis untuk mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan (Gottschalk, 1985: 53-54).

Langkah kedua, kritik, ditempuh setelah sumber-sumber data dapat dikumpulkan cukup memadai. Langkah kritik sumber dilakukan untuk memilih dan memilah sumber-sumber data sejarah yang penting dan relevan dengan penelitian ini. Ada dua kategori kritik sumber yang perlu dilakukan dalam penelitian ini, yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian (otentisitas) sumber, sementara kritik intern diadakan untuk menguji tingkat kepercayaan (kredibilitas) sumber (Kuntowijoyo, 1995: 99).

Setelah menempuh kritik, penulis melakukan langkah ketiga, yakni interpretasi dengan cara analisis dan sintesis. Analisis ditempuh dengan cara menjabarkan sebuah pokok bahasan ke dalam bagian-bagian subpokok bahasan, sedangkan sintesis

dilakukan dengan cara menyatukan bagian-bagian subpokok bahasan ke dalam satuan bahasan yang bulat.

Sebagai langkah terakhir, penulis melakukan historiografi, upaya semacam rekonstruksi tertulis mengenai Muhammadiyah dan kepemimpinan politik perempuan yang dianalisis dengan perspektif sejarah, terutama aspek kronologi dan kausalitas (Widja, 1988: 24). Mengacu pada pendapat Kuntowijoyo (1995: 103), historiografi yang ditempuh penulis meliputi tiga bagian pokok, yakni pengantar, hasil penelitian, dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi Islam tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

Kepemimpinan politik perempuan dalam Islam masih merupakan persoalan yang kontroversial, dalam arti menimbulkan sikap pro dan kontra. Secara normatif mayoritas ulama, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, pada umumnya menolak kepemimpinan politik perempuan. Bagi ulama Sunni, syarat utama untuk menjadi seorang Khalifah atau Kepala Negara selain alim, memiliki kapabilitas dan integritas moral, dari keturunan Arab Quraisy, dan harus laki-laki. Demikian pula, para ulama Syiah mempersyaratkan keharusan laki-laki dan keturunan *ahlul bait* Rasulullah (anak keturunan Fatimah putri Rasulullah dan Ali ibn Abi Thalib) untuk menduduki jabatan Imam atau Kepala Negara.

Sedikitnya ada tiga dalil *naqli* (Al Quran atau Al Hadits) yang biasanya dijadikan sebagai landasan bagi kalangan ulama untuk menolak kepemimpinan politik perempuan. *Pertama*, Al Quran surah Al Ahzab ayat 33 yang menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi kaum perempuan adalah di rumah. Artinya, kaum perempuan lebih pas untuk menggeluti urusan rumah tangga (*domestic affairs*) dan bukan berada di ruang publik (*public affairs*) seperti menjadi pemimpin politik.

Pandangan ini diperkuat oleh sebuah Hadits yang menyebutkan bahwa Allah telah menempatkan empat rumah bagi seorang perempuan, yaitu: (1) rahim ibu, (2) rumah orang tua sampai ia menikah, (3) rumah keluarga bersama suami dan anak-anaknya, serta (4) di dalam kubur (Subhan, 2004: 43).

Kedua, Al Quran surah An Nisa ayat 34, yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati-mu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan-nya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Ketiga, hadits nabi riwayat Abu Bakrah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya: “*tidak mungkin beruntung (jaya) suatu masyarakat yang menguasai urusan mereka kepada seorang perempuan*” (Sahih Bukhari). Hadits inilah yang digunakan sebagai rujukan oleh sebagian besar ulama *Salaf* (terdahulu) untuk mensyaratkan keharusan memilih laki-laki sebagai kepala negara atau pemimpin politik, sekaligus untuk menegaskan haram hukumnya bagi perempuan untuk menempati kedudukan sebagai kepala negara atau pemimpin politik. Sebagai contoh, Imam Al Syaikani ketika menafsirkan hadits ini berpendapat bahwa wanita tidak termasuk kategori ahli dalam hal kepemimpinan sehingga tidak boleh menjadi kepala negara atau pemimpin politik. Al Khattabi menyatakan bahwa seorang wanita tidak sah menjadi seorang khalifah atau kepala negara. Al Ghazali dan Ibnu Hazm mengharuskan laki-laki sebagai syarat menjadi kepala negara atau pemimpin politik (Muhibbin, 1996: 75).

Hadits ini memang kerap dipahami secara tekstual tanpa melihat *asbab al wurud*-nya. Padahal hadits ini bersifat kasuistik dan tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadits tersebut melengkapi kisah Raja Persia, Kisra, yang merobek surat Nabi Muhammad. Belakangan Raja Kisra mati dibunuh oleh anak laki-lakinya. Berikutnya, anak laki-laki tersebut mati diracun oleh saudaranya, sampai akhirnya kekuasaan dipegang oleh seorang raja perempuan, Baruan binti Syiruayah ibnu Kisra. Namun, tidak lama kemudian kekuasaan raja perempuan tersebut hancur berantakan (Subhan, 2004: 44-45).

Mengenai QS An Nisa ayat 34 di atas, para mufasir modern, menurut Ilyas (2002: 68-69), umumnya berpendapat bahwa ayat tersebut hanya terkait dengan otoritas kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, yakni sebagai suami bagi sang istri dan ayah bagi anak-anaknya, serta bukan dalam konteks jabatan kepala negara atau kepemimpinan politik. Otoritas kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga terlihat dari kewajiban suami untuk menasihati, pisah ranjang dan menjatuhkan sanksi pukulan terhadap istrinya yang melakukan *nusyuz* (pembangkangan atau tidak taat dalam perkara yang baik).

Alasan yang dipakai oleh QS An Nisa ayat 34 itu guna menjawab pertanyaan mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, ialah: (1) karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, dan (2) karena kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya (istri dan anak-anaknya).

Menurut Ash Shabuni, seorang ulama Sunni modern, kepemimpinan laki-laki dalam urusan rumah tangga bermula dari kelebihan intelektual yang dimiliki oleh laki-laki, kemampuan laki-laki dalam mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah dan membiayai rumah tangganya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Adapun ulama Syiah modern, Thaba'thaba'i, berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan intelektual dibandingkan dengan perempuan, yang karena kelebihan itu laki-laki lebih tabah dan tahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kebalikannya, kehidupan perempuan lebih menonjol segi emosionalitasnya yang dibangun di atas landasan sifat kelembutan dan kehalusannya (Ilyas, 2002: 69).

Bagi kalangan ulama yang menjadikan QS An Nisa ayat 34 sebagai dalil yang melarang kepemimpinan politik perempuan berpijak pada kelebihan intelektual yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang lebih menonjol emosionalitasnya.

Dengan demikian, baik hadits riwayat Abu Bakrah maupun QS An Nisa ayat 34 harus dipahami sebagai anjuran dan bukan keharusan bahwa kepemimpinan politik wajib berada di tangan laki-laki. Secara tekstual kurang tepat keduanya dijadikan sebagai dalil yang melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik. Persyaratan yang harusnya terpenuhi, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang ingin tampil menjadi pemimpin politik, terutama adalah kapabilitas dan integritas moral yang harus dimiliki.

Naiknya Megawati Soekarnoputri Menjadi Presiden RI

Megawati Soekarnoputri mulai tampil di panggung politik nasional sejak tahun 1993 lewat dukungan arus bawah. Ketika itu dia terpilih sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, dan selanjutnya dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) PDI di Jakarta. Dalam KLB di Surabaya, Megawati mengalahkan kubu Suryadi yang telah lama dan malang melintang sebagai pengurus PDI.

Megawati merupakan sosok pemimpin politik yang sangat populer. Ia mewarisi kharisma bapaknya, Soekarno, Proklamator dan Presiden RI I, memiliki *massa* pendukung yang besar dan fanatik. Perjalanan karir politiknya kaya dengan pengalaman pahit, seperti kasus 27 Juli 1996. Meskipun telah terjadi berbagai upaya untuk meminggirkannya, namun ia tetap eksis dan bahkan semakin besar pengaruhnya (Parianom dan Dondy Ariesdianto, ed., 1999: v).

Dalam Pemilu 1999, PDI-P meraih posisi teratas dan menjadi pemenang, disusul oleh Partai Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Kendatipun kemenangan PDI-P merupakan kemenangan mayoritas sederhana (hanya sekitar 33 %), namun dalam etika politik berdemokrasi sudah sewajarnya apabila Megawati diberi kesempatan pertama untuk dapat tampil sebagai Presiden RI.

Adalah Amien Rais, Ketua Umum PAN, dan motor utama kekuatan Poros Tengah (aliansi parpol Islam dan berbasis massa Islam (PPP, PBB, PK, PAN dan belakangan PKB)) yang berhasil mengangkat isu kekhawatiran perpecahan bangsa jika Megawati atau Habibie terpilih menjadi presiden. Bila Habibie menjadi presiden, maka *massa* Megawati akan melakukan penolakan. Sebaliknya, bila Megawati yang naik menjadi presiden, maka kaukus Iramasuka akan melakukan perlawanan. Oleh sebab itu, diperlukan alternatif yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Amien Rais kemudian memunculkan nama K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tokoh inilah yang kemudian terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Habibie pada Sidang Umum (SU) MPR bulan Oktober 1999 (Suara Muhammadiyah, No. 16, Th. Ke-86, 16-31 Agustus 2001: 37).

K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 1999 tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh Poros Tengah. Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI, setelah memenangkan pemungutan suara menghadapi Megawati (Gus Dur mendapat 373 suara, sementara Megawati 313 suara), merupakan puncak keberhasilan kekuatan politik Poros Tengah (Suharsono, 1999: 131).

Kepemimpinan Gus Dur yang pada awalnya diharapkan oleh kalangan kekuatan politik Islam akan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat muslim justru malah mengecewakan. Mengacu analisis Gus Nur (2001: 17-24), kepemimpinan Gus Dur dinilai penuh dengan rapor merah karena bersifat inkonsisten (*mencla-mencle*), cuek, arogan, namun pada saat yang sama mengidap ketakutan yang berlebihan (*paranoid*), dan tidak segan mengeluarkan teror kata-kata (sebagai fitnah atau *fait accompli*), serta (ancaman) gerakan massa untuk menghadapi kritik. Bagi Poros Tengah, terlalu riskan dan penuh resiko apabila tetap mempertahankan Gus Dur sebagai Presiden RI ke-4, dalam suasana krisis multidimensi yang belum dapat diatasi (Suwarno, 2002: 97).

Naiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI menggantikan Gus Dur melalui proses yang unik. Hanya beberapa jam setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan DPR dan MPR, SI MPR pun digelar dengan agenda utama pemungutan suara untuk menolak atau menerima dekrit. Anggota MPR yang hadir sebanyak 601 orang, 599 orang di antaranya menolak dekrit. Mandat yang diberikan oleh MPR kepada Gus Dur ditarik kembali sehingga berakhirilah masa jabatan Gus Dur. Megawati secara otomatis naik menjadi Presiden karena posisinya sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Gus Dur. Hamzah Haz kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Megawati (Uchrowi, 2004: 280-281).

Banyak pengamat politik yang meragukan kemampuan Megawati Soekarnoputri. Arief Budiman, misalnya, menganggap bahwa diamnya Megawati karena dia tidak tahu persoalan. Artinya, kapabilitas tokoh tersebut sangat diragukan. Adapun Daniel

Lev lebih melihat ketergantungan Megawati kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menurut Lev, kenyataan tersebut selain menunjukkan rendahnya kapabilitas, tokoh seperti Megawati yang terlalu bergantung pada orang-orang di sekelilingnya tidak boleh dibiarkan menjadi presiden (Suharsono, 1999: 52).

Pengamat yang lain, seperti Yudi Latief menyebut fenomena tampilnya Megawati sebagai “ironi Indonesia” karena kepemimpinannya dibangun melalui mitos-mitos yang tumbuh subur mengelilinginya. Eep Syaifullah Fattah mengamati kepemimpinan Megawati sebagai memiliki kecenderungan feodalistik, yang ciri utamanya Megawati kian menjauh dari publik dan bukan sebaliknya. Sementara itu, Arbi Sanit lebih melihat pada pengkultusan yang berlebihan dari para pengikutnya sebagai kelemahan utama kepemimpinan Megawati (Suharsono, 1999: 52).

Respons Muhammadiyah atas Tampilnya Presiden Megawati Soekarnoputri

Di kalangan partai politik Islam, PPP dapat dinilai yang paling keras dan serius menentang serta menolak Megawati Soekarnoputri untuk tampil menjadi kandidat presiden menggantikan Habibie. Alasan yang kerap dipakai oleh para tokoh PPP, terutama Hamzah Haz dan Zarkasih Noor, adalah karena Megawati seorang perempuan, sedangkan sebagian besar ulama Islam mengharamkan perempuan tampil sebagai kepala negara (Suharsono, 1999: 54).

Akan tetapi, PPP pula yang paling tidak konsisten. Pada waktu Presiden Gus Dur dilengserkan oleh MPR dalam Sidang Istimewa (SI) bulan Juli 2001 dan kemudian MPR menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden menggantikan Gus Dur, PPP menyetujui. Bahkan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Megawati melalui tiga tahapan *voting* dengan mengalahkan calon lain, seperti Akbar Tanjung, Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, dan Siswono Yudhohusodo.

Bagaimana pandangan Muhammadiyah mengenai kepemimpinan politik perempuan, terutama dengan tampilnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI sejak bulan Juli 2001, tampaknya tidak ada kesatuan pandangan di kalangan para tokohnya. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman, salah seorang tokoh penting Muhammadiyah yang aktif di Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, diberitakan Ia mengharamkan calon presiden perempuan. Sebenarnya pendapat tersebut berangkat dari pemahaman beliau bahwa calon yang dimaksud (Megawati Soekarnoputri) memang kurang kapabel dan kredibel.

Tokoh Muhammadiyah lain yang dikenal liberal, Prof. Dr. Azyumardi Azra (Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta), memandang bahwa persoalan kepemimpinan politik (khususnya untuk jabatan kepala negara) di Indonesia sebenarnya tidak perlu mempertentangkan soal *gender*, tetapi yang lebih penting

adalah aspek kualitas. Preseden historisnya di Indonesia cukup banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin politik dan kepala negara. Azra (dalam Parianom dan Dondy Ariedianto, eds., 1999: 113) mencontohkan kasus Kesultanan Aceh, di mana terdapat empat orang perempuan yang tampil menjadi Sultanah di Aceh dan mereka memerintah dalam waktu yang lama (1641-1699 M) serta mendapatkan dukungan yang cukup dari para ulama. Keempat Sultanah Aceh tersebut adalah:

1. Sultanah Safi'atuddin (memerintah 1641-1675),
2. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1677),
3. Sultanah Inayah Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan
4. Sultanah Kamal Zainatuddin Syah (1688-1699).

Lebih jauh, Azra menyebutkan bahwa dalam kasus empat Sultanah di Aceh tersebut, para ulama Aceh tidak terlalu mempersoalkan aspek *gender* tetapi lebih mempertimbangkan aspek kualifikasi. Syekh Nuruddin Ar-Raniry, ulama Aceh paling terkemuka dari abad ke-17 M, dalam kitabnya, *Bustanus Salatin*, menjelaskan bahwa setiap penguasa (entah laki-laki ataupun perempuan) harus memenuhi kualifikasi: sifat-sifat yang terpuji, tingkah laku kebajikan, melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sangat taat kepada Allah dan komitmen menegakkan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. (Azra, dalam Parianom dan Dondy Ariedianto, eds., 1999: 115).

Yunahar Ilyas, salah satu tokoh penting Muhammadiyah yang aktif di Majelis Tabligh, memiliki pandangan yang sudah sangat maju mengenai kepemimpinan politik perempuan. Menurut Ilyas (2002: 71-72), dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu ayat pun di dalam Al Quran yang secara eksplisit melarang perempuan tampil menjadi kepala negara atau kepemimpinan publik lainnya. Kepemimpinan publik merupakan bagian dari ajaran Islam yang luas, dan bukan termasuk ibadah *mahdhah*. Sehubungan dengan itu, dalam soal kepemimpinan publik termasuk di dalamnya kepemimpinan politik, kaidah (hukum fiqh) yang berlaku adalah "semuanya boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya".

Dalam pandangan Ilyas, menggunakan QS An Nisa ayat 34 sebagai dalil untuk melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik, kepala negara, atau pemimpin publik lainnya tidak tepat. Hal itu karena ayat tersebut secara khusus hanya berbicara soal kepemimpinan dalam konteks rumah tangga. Di samping itu, jika dipakai logika terbalik bahwa untuk memimpin rumah tangga saja perempuan tidak mempunyai hak, apalagi untuk memimpin negara, logika seperti ini pun tidak dapat diterima karena bertentangan dengan QS An Nisa ayat 71. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan beriman (hendaknya) tolong-menolong dan pimpin-memimpin dalam melakukan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Logika tersebut juga bertentangan dengan realitas sosial yang terjadi pada zaman sahabat, misalnya tatkala istri Nabi, Aisyah, memimpin perang unta.

Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif yang kerap dipanggil Buya Syafii, merupakan tokoh yang sangat *concern* dan malahan mendorong kaum perempuan untuk terjun dan terlibat secara aktif dalam kepemimpinan politik. Menurut beliau, dalam konteks kehidupan politik, keberadaan perempuan tidak mungkin dinafikan bila ingin mencapai peradaban yang manusiawi. Artinya, dalam sistem dan proses politik yang dibangun khususnya oleh bangsa Indonesia, perempuan harus senantiasa dilibatkan atau terlibat secara demokratis (lihat dalam Suara Muhammadiyah, No. 07, Th. Ke-88, 11-15 April 2003: 11).

Menurut Buya Syafii (dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07, th.ke-88, 1-15 April 2003: 38-39), realitas sosial-politik yang membuat keberadaan perempuan terpinggirkan dalam percaturan politik lebih disebabkan oleh masalah kultural dan penafsiran ajaran agama (baca: Islam). Yang dimaksud masalah kultural adalah budaya patriarkhat yang masih mendominasi bangsa Indonesia, kendatipun mayoritas muslim. Adapun dari perspektif agama, prinsip kesetaraan *gender* didukung sepenuhnya oleh Al Quran, misalnya QS At Taubah ayat 71, yang secara gamblang menegaskan tentang adanya kesetaraan gender dalam ruang lingkup pergaulan yang luas. QS At Taubah ayat 71 menegaskan (artinya):

“Dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka adalah penolong terhadap satu sama lain; mereka menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan jahat; mereka dirikan shalat, bayarkan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka akan mendapat rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah itu gagah, bijaksana.”

Islam sebetulnya sarat dengan pesan kesetaraan gender dan keadilan bagi kehidupan umat manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Yang terjadi selama ini ada semacam kekeliruan dan penafsiran yang terlalu subjektif terhadap ajaran agama (Islam) sehingga lebih menguntungkan kaum laki-laki, dan sebaliknya merugikan kaum perempuan.

Dalam pandangan Asep Purnama Bahtiar, salah seorang tokoh muda Muhammadiyah, keterlibatan politik perempuan yang semakin meningkat di tanah air merupakan sebuah tuntutan keniscayaan. Ada tiga alasan yang dapat dikemukakan. *Pertama*, dilihat dari segi komposisi penduduk Indonesia di mana jumlah perempuan (51 %) lebih besar daripada laki-laki (49 %) sehingga wajar bila keterlibatan perempuan dalam politik semakin besar. *Kedua*, keterlibatan kaum perempuan dalam panggung politik menjadi bagian atau unsur yang signifikan dari demokrasi. sebab demokrasi bersifat inklusif, anti-diskriminasi, dan tidak bias gender. *Ketiga*, secara historis semangat dan cita-cita perjuangan kemerdekaan di tanah air juga dibangkitkan oleh kaum perempuan, melalui peran tokoh perempuan seperti Kartini dan Dewi Sartika (Bahtiar, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07 th. K-88, 1-15 April 2003: 34).

Secara kelembagaan, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tidak pernah memandang bahwa perempuan haram untuk tampil dalam kepemimpinan publik, termasuk dalam kepemimpinan politik. Artinya, Muhammadiyah menganut prinsip kesetaraan gender sebagaimana diatur di dalam kitab suci Al Quran. Dengan demikian, Muhammadiyah tidak pernah menolak kepemimpinan perempuan, seperti tampilnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI dalam SI MPR bulan Juli 2001 menggantikan Presiden Gus Dur.

SIMPULAN

Demikianlah dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah, baik secara perorangan melalui tokoh-tokoh penting organisasi maupun secara kelembagaan tidak mempersoalkan keterlibatan atau tampilnya perempuan dalam kepemimpinan publik, khususnya kepemimpinan politik. Hal ini dikarenakan dalam corak pemikiran politik, Muhammadiyah cenderung bersifat substansialistik, bukan formalistik ataupun fundamentalistik. Ketika Megawati Soekarnoputri tampil menjadi Presiden RI, Muhammadiyah melalui para tokohnya seperti Asjmundi Abdurrahman dan Azyumardi Azra, tidak mengkritik aspek *gender*-nya tetapi lebih mempersoalkan aspek kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. "Bukan Gender Tapi Kualitas", dalam Parianom, Bambang dan Dondy Ariesdianto. Eds. 1999. *Megawati dan Islam Polemik Gender dalam Persaingan Politik*. Surabaya: Antar Surya Jaya dan LSK.
- Bahtiar, Asep Purnama. "Perempuan Politik dan Politik Perempuan", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07, Th. Ke-88, 11-15 April 2003.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Ilyas, Yunahar. 2002. "Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Tinjauan Tafsir Al Quran", dalam *Tarjih, Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Edisi ke-3. Januari 2002. Yogyakarta: LPPI UMY bekerjasama dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

- Maarif, Ahmad Syafii. 1987. *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- . “Peran Perempuan dalam Proses Politik Demokratik (Dalam Perspektif Seorang Muslim)”, dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07, Th. Ke-88, 11-15 April 2003.
- Muhibbin. 1996. *Hadits-hadits Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parianom, Bambang dan Dondy Ariesdianto. Eds. 1999. *Megawati dan Islam Polemik Gender dalam Persaingan Politik*. Surabaya: Antar Surya Jaya dan LSK.
- Pasha, Musthafa Kamal dan Adaby Darban. 2000. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
- Suara Muhammadiyah*, No. 16, Th. Ke-86, 16-31 Agustus 2001.
- Suara Muhammadiyah*, No. 07, Th. Ke-88, 1-15 April 2003
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Suharsono. 1999. *Cemerlangnya Poros Tengah*. Jakarta: Perennial Press.
- Suwarno. 2002. *Muhammadiyah sebagai Oposisi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Uchrowi, Zaim. 2004. *Mohammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani. An Authorized Biography*. Jakarta: Teraju.
- Widja, I.G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah : Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.